

SKRIPSI

**ANALISIS KELEMBAGAAN (STUDI KASUS PADA BADAN USAHA MILIK
DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG)**

ANANDA PUTRI

E011201081



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPATEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ananda Putri
Nim : E011201081
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Analisis Kelembagaan (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Makassar, 31 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Gita Susanti, M.Si.

NIP. 196503111991032001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi

Prof. Dr. Alwy M.Si.

NIP. 196310151989031006



LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KELEMBAGAAN
(STUDI KASUS PADA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

Ananda Putri

E011201081

Skripsi

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada tanggal
Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Administrasi Publik
Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Gita Susanti, M.Si.
NIP. 196503111991032001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Administrasi



Prof. Dr. Atwi, M.Si
NIP. 196310161989031006



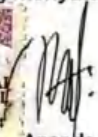
**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Kelembagaan (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Gita Susanti, M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 03 Juni 2024

Yang menyatakan,




Ananda Putri
E011201081



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Gita Susanti, M.Si sebagai dosen pembimbing, Drs. Nelman Edy, M.Si sebagai dosen penguji 1, dan Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M. Si sebagai dosen penguji 2 atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Seluruh dosen Departemen Ilmu Administrasi dan seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan dan pelajaran-pelajaran hidup lainnya yang sangat berharga. Kepada bapak Andi Rifai, SH.i dan seluruh pegawai Badan Usaha Milik Desa Mabbulo Sipeppa, terima kasih atas kesediaan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian dan pengambilan data.

Kepada kedua orang tua tercinta, bapak Haryanto dan ibu Jumiaty serta saudara-saudara tersayang, Andika Mandala Putra dan Anita Athalia terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan moral dan material yang tak terhingga, kerja keras, dan pengorbanannya hingga penulis menyelesaikan pendidikan, gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian.

Kepada Muhammad Shafwan Rabbani. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih telah setia mendampingi selama penyusunan skripsi ini, yang senantiasa membantu, memberikan masukan serta dorongan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.

Kepada sahabat-sahabat tercinta penulis, untuk My Chicago (Rika, Yola, Sukma, Trinand, Syalom, Huzniar) Askul Squad (Ayu, Riska, dan Ira. Terima kasih sudah menjadi rumah kedua, tempat berbagi keluh kesah, menghibur, dan mendukung penulis selama menjalani pendidikan. Sukses untuk kalian selalu.

Kepada teman-teman PENA 2020, terima kasih sudah menjadi tempat belajar, melepas penat, berbagi suka duka selama proses perkuliahan. Dan Kepada teman-teman KKN 110 Botolempangan terima kasih juga karena telah memberikan dukungan kepada penulis dan semua pihak yang terlibat yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terakhir, terima kasih juga sebesar-besarnya untuk diri sendiri karena sudah berjuang dan tidak menyerah hingga titik ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, ini merupakan ut dibanggakan untuk diri sendiri. Tetap bersyukur dan rendah hati.



Penulis,



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRAK

Ananda Putri (E011201081). Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Analisis Kelembagaan (Studi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang), iv+ 60 halaman 4 tabel 1 gambar + 27 Daftar Pustaka + Lampiran, Dibimbing oleh Dr. Gita Susanti, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

Hasil dari penelitian menunjukkan secara umum Analisis kelembagaan (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang). Berdasarkan teori Scott (2001) Ada 3 indikator yaitu pilar regulatif, pilar normatif dan pilar kultur kognitif. Indikator belum di terapkan dengan baik yaitu pilar regulatif dan pilar normatif. Pilar kultur kognitif sudah cukup baik.

Kata kunci: Analisis Kelembagaan, BUMdes



Optimized using
trial version
www.balesio.com



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRACT

Ananda Putri (E011201081). Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Institutional Analysis (Study of Village-Owned Enterprises in Improving the Economy in Bulu Village, Panca Riang District, Sidenreng Rappang Regency), iv + 60 pages, 4 tables, 1 figure, + 27 references + appendices, Supervised by Dr. Gita Susanti, M.Si.

This study aims to identify and describe the institutional analysis of Village-Owned Enterprises in improving the economy of the Bulu Village community, Panca Riang District, Sidenreng Rappang Regency. This research uses a qualitative approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation.

The results of the study generally show the institutional analysis (Case Study on Village-Owned Enterprises in improving the economy of the Bulu Village community, Panca Riang District, Sidenreng Rappang Regency). Based on Scott's theory (2001), there are 3 indicators, namely the regulative pillar, the normative pillar, and the cognitive cultural pillar. The indicator that has not been well implemented is the regulative pillar and the normative. cognitive cultural pillars are already quite good.

Keywords: Institutional Analysis, BUMDes



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Teori.....	7
1.3 Rumusah Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II METODE PENELITIAN	11
II.1 Pendekatan Penelitian	11
II.2 Lokasi Penelitian	11
II.3 Fokus Penelitian.....	11
II.4 Informan Penelitian	12
II.5 Sumber data	12
II.6 Teknik Pengumpulan Data.....	12
s Data	13
RESEARCH DESIGN DAN PEMBAHASAN	15
Pembahasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mabbulo	15
Kebijakan (aturan, hukum dan saksi dalam BUMDes)	17



III.1.2 Pilar Normatif	25
III.1.3 Pilar Kultur Kognitif.....	28
BAB IV PENUTUP	32
IV.1 Kesimpulan	32
IV.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rata-Rata Pendapatan Setiap Unit Usaha BUMDes Mabbulo Sipeppa	5
Tabel III.1 Ringkasan Dari 3 (tiga) Dimensi Kelembagaan	16
Tabel III.2 Peraturan Pemerintahan Desa Terkait Pendirian Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Mabbulo Sipeppa Nomor 7 Tahun 2021	18
Tabel III. 3 Aturan Dalam AD/ART Nomor 5 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa Mabbulo Sipeppa	20
Tabel III.4 Pemberhentian Pengurus BUMDes Dalam AD/ART Badan Usaha Milik Mabbulo Sipeppa Nomor 5 Tahun 2021	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep.....	9
---------------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis.....	38
Lampiran 2. Surat permohonan izin melakukan penelitian dari FISIP Universitas Hasanuddin.....	39
Lampiran 3. Surat permohonan izin melakukan penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan	40
Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.....	41
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang	42
Lampiran 6. Dokumentasi penelitian.....	43
Lampiran 7. Logbook Penelitian	52
Lampiran 8. Struktur Organisasi dan Perturan-Peraturan BUMDes	58



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan strategis bagi pemerintahan desa untuk melakukan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa dan swadaya masyarakat tanpa meninggalkan kearifan lokal untuk mencapai desa yang mandiri.

Masyarakat desa harus diposisikan sebagai subjek pembangunan itu atau pelaku sendiri, sehingga masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefinisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan di Desa. Salah satu program pemerintah dalam pembangunan desa mendukung yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan Pembangunan ekonomi. Untuk diketahui bahwa hampir 70% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, dimana desa merupakan titik sentral dari suatu pembangunan, mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam hal mendorong iklim perekonomian pusat, oleh karena itu pembangunan di desa harus lebih diprioritaskan.



an perekonomian di masyarakat sudah sejak lama dijalankan oleh berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang mana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya aksi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin . Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak

berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat.

Terciptanya BUMDes diharapkan ekonomi masyarakat akan terwujud, rakyat akan sejahtera, potensi desa akan terkelola, terciptanya peluang dan jaringan pasar, dan membuka lapangan pekerjaan kegiatan perekonomian yang di serahkan ke masyarakat dalam bentuk program dan proyek dari pemerintahan daerah seperti usaha ekonomi. Ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategi di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan Lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi masyarakat dengan menciptakan dan meningkatkan peluang usaha, lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan desa sampai pada titik kesejahteraan masyarakat. BUMDes perlu didirikan menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Lembaga BUMDes merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dominan berbasis pada sektor ekonomi masyarakat desa yang dijadikan sebagai bentuk kebijakan dan salah satu pendekatan strategis untuk membantu mewujudkan harapan kestabilan dinamika pada sektor perekonomian masyarakat. Secara umum pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tergolong dalam aktivitas sektor ekonomi pedesaan yang mendasar dan dasar dalam melaksanakan dua fungsi strategis termasuk dalam kegiatan ekonomi pedesaan sebagai dasar menjalankan dua fungsi strategis meliputi sebagai lembaga sosial dan ekonomi. Kebijakan mengenai BUMDes memiliki Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwasanya lembaga BUMDes adalah satu lembaga usaha yang terdapat di desa yang diharapkan



mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas ekonomi yang dimiliki serta dikelola oleh masyarakat desa melalui struktur kelembagaan lokal, dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian di wilayah pedesaan. Aktivitas yang dijalankan oleh BUMDes sangat bervariasi, tergantung pada potensi dan kebutuhan spesifik dari masing-masing desa. Salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh BUMDes adalah pengembangan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan tangan, dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, BUMDes juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penduduk desa, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai bidang.

Badan Usaha Milik Desa dibentuk di setiap desa dan diharapkan memperkuat perekonomian desa (Herry Azhar Pradana, 2019). BUMDes bekerja dengan cara mewadahi dan memfasilitasi aktivitas perekonomian masyarakat dalam bentuk lembaga usaha dan diatur dengan profesionalitas, dan tentunya berbasis pada kekhasan sumber daya lokal. Di seluruh Indonesia tercatat hingga pada bulan November 2018 Sebanyak 41 ribu unit BUMDes yang sudah berdiri di Indonesia akan tetapi belum sepenuhnya memiliki perkembangan yang baik, dan masih memerlukan pendampingan supaya mampu menampung aktivitas ekonomi yang tumbuh di desa dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (KEMENDES PDTT, n.d.).

Pentingnya pembangunan BUMDes dalam perekonomian masyarakat antara lain: Pertama, BUMDes sebagai bisnis sosial desa. BUMDes bisa berperan sebagai lembaga bisnis sosial yaitu lembaga bisnis yang berorientasi memberikan pelayanan pada masyarakat sehingga bisa memaksimalkan potensi mereka. Bisnis sosial yang dimaksud yaitu sebuah usaha yang berorientasi pada pelayanan publik warga desa yang mampu berfungsi sebagai lembaga penyangga (buffer institurion) perekonomian masyarakat. Kedua, memiliki relevansi dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat beberapa desa BUMDes mempunyai sejumlah relevansi penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ketiga, pemerintah memberikan peluang. Selain memberikan kesempatan kepada BUMDes yang dibentuk oleh masing-masing desa untuk mengembangkan ekonomi di masyarakat, pemerintah juga memberikan peluang kepada desa untuk membentuk BUMDes bersama.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes akan oleh masyarakat desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih . Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian igus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi



masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (MA Junaidi: 2018)

Permendagri No. 39 Tahun 2010 menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa didirikan, dengan masyarakat dan pemerintah desa mengelola kepemilikan dan uangnya. Karena tujuan didirikannya BUMDes sesuai Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2016 berisi: prinsipnya Badan Usaha Milik Desa didirikan oleh Pemerintah Desa dengan tujuan untuk sebagai berikut:

1. Meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat
2. Mengelola Potensi ekonomi masyarakat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Mengintensifkan upaya lingkungan;
4. Membuat rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan satu atau lebih pihak eksternal;
5. Menciptakan jaringan dan peluang pasar yang mendukung kebutuhan pelayanan publik;
6. Menciptakan lapangan kerja;
7. Memajukan pelayanan umum, mendorong pembangunan, dan menyeimbangkan perekonomian masyarakat pedesaan untuk membina kesejahteraan masyarakat desa;
8. Meningkatkan pendapatan awal masyarakat pedesaan.

Tantangan BUMDes saat ini yaitu masih rendahnya kinerja dalam pembangunan ekonomi dan terlihat dari banyaknya kekurangan dalam proses pelaksanaannya serta basis unit usaha yang belum optimal (Kinasih, dkk., 2020). Badan Usaha Milik Desa yang sudah berjalan membangun unit usaha dalam persaingan produk dipasaran. Usaha yang dilakukan oleh BUMDes hanya dalam skala kecil dan hanya mampu digunakan untuk operasional produksi. Artinya kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes belum mampu menganalisis keadaan ekonomi masyarakat secara umum. Hal yang terpenting dalam penguatan lembaga ini akan mengelola segala sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kondisi yang juga turut mempengaruhi kondisi BUMDes yang ada tidak lepas dari kondisi organisasi dalam menjalankan BUMDes sebagai ekonomi masyarakat. pengelolaan BUMDes sangat diperlukan agar bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa mencapai tujuan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh Dwinanda Yuliza (2022). Analisis Kapasitas Kelembagaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes di Desa Purwono Bakti



Optimized using
trial version
www.balesio.com

II Kabupaten Bungo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan BUMDes sangat berpengaruh terhadap peningkatan tak jelasan penganggaran alokasi dana desa pada kepemimpinan menghambat perkembangan BUMDes, lemahnya kapasitas isnya permodalan, serta belum memadainya sarana dan prasarana perluas jenis usaha dan jaringannya. Dan untuk mewujudkan uh perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang

berkualitas, pembentukan keanggotaan organisasi yang kuat, perluasan jaringan BUMDes, dukungan lingkungan organisasi dan ruang lingkup kegiatan. Yang mampu mewujudkan pengembangan Usaha Kecil dan menengah.

Terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada bagaimana fungsi kelembagaan BUMDes mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat desa. Dan memahami bagaimana Kelembagaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bulu. Sedangkan Analisis Kapasitas Kelembagaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes di Desa Purwono Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo berfokus pada kemampuan internal BUMDes seperti tata kelola, dan kapasitas organisasi untuk meningkatkan performa BUMDes.

Dikabupaten Sidenreng Rappang tercatat ada sebanyak 61 desa yang mendirikan atau membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 106 desa/kelurahan yang ada. Di desa Bulu Kecamatan Panca Rijang termasuk desa yang telah membentuk BUMDes yang diberi nama BUMDes Mabbulo Sipeppa terbentuk sejak 24 Januari 2020. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan melakukan potensi perekonomian pedesaan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menekankan jumlah kemiskinan penduduk Desa. Dengan adanya BUMDes Mabbulo Sipeppa di Desa Bulu diharapkan mampu mendorong aktivitas perekonomian masyarakat, yakni dengan membuka kesempatan masyarakat untuk lebih maju serta bersaing sesuai dengan keterampilan yang dimiliki melalui pengembangan sumber daya alam dan potensi desa.

Tabel I.1 Rata-Rata Pendapatan Setiap Unit Usaha BUMDes Mabbulo Sipeppa Tahun 2020-2023

Pendapatan setiap unit usaha tahun 2020

No	Unit Usaha	Pendapatan
1	Usaha Jahit & Konveksi	1.720.102
2	Usaha Penggaduhan Sapi	9.000.000
3	Usaha tabung Gas Lpg	3.965.000
4	Budidaya Ikan Terpal	1.100.000

Pendapatan setiap unit usaha tahun 2021

No	Unit Usaha	Pendapatan
1	Usaha Jahit & Konveksi	2.100.000
2	Usaha Penggaduhan Sapi	19.200.000
3	Usaha tabung Gas Lpg	8.385.000
4	Budidaya Ikan Terpal	400.000



Pendapatan setiap unit usaha tahun 2022

No	Unit Usaha	Pendapatan
1	Usaha Jahit & Konveksi	3.280.000
2	Usaha Penggaduhan Sapi	4.000.000
3	Usaha tabung Gas Lpg	6.200.000
4	Budidaya Ikan Terpal	670.000

Pendapatan setiap unit usaha tahun 2023

No	Unit Usaha	Pendapatan
1	Usaha Jahit & Konveksi	1.976.000
2	Usaha Penggaduhan Sapi	26.750.000
3	Usaha tabung Gas Lpg	6.679.000
4	Budidaya Ikan Terpal	2.000.000

Sumber: Laporan BUMDes Mabbulo Sipeppa (2023)

Berdasarkan Tabel Rata-rata Pendapatan Setiap Unit Usaha BUMDes Mabbulo Sipeppa Tahun 2020-2023 dapat disimpulkan, yaitu:

- Usaha Penggaduhan Sapi : secara konsisten menghasilkan pendapatan tertinggi dari semua unit usaha, dengan fluktuasi signifikan setiap tahun.
- Budidaya Ikan Terpal : menunjukkan fluktuasi yang besar, dengan penurunan tajam pada tahun 2021 dan peningkatan pada tahun 2023.
- Usaha Jahit & Konveksi dan Usaha Tabung Gas Lpg : menunjukkan pola pendapatan yang lebih stabil, meskipun ada fluktuasi tahunan.

Badan Usaha Milik Desa Mabbulo Sipeppa merupakan lembaga yang ada di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang yang memiliki 4 Unit usaha yaitu:

1. Unit usaha jahit & konveksi, unit usaha ini membuat pakaian jadi seperti kemeja, celana, rok, dan berbagai jenis pakaian lainnya.
2. Unit Usaha Penggaduhan Sapi. Unit usaha ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi untuk menghasilkan ternak bibit sapi, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi (termasuk kegiatan penggemukan).
3. Unit usaha tabung gas lpg didirikan dengan tujuan utama untuk mengatasi kelangkaan gas di lingkungan masyarakat. Dengan menyediakan khusus masyarakat Desa Bulu agar lebih mudah dan terjangkau.



n Terpal. Unit Usaha ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya r di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran in) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Bulu mengenai kelembagaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Bulu, permasalahan Pengelolaan kelembagaan BUMDes, yaitu kurangnya pemahaman terkait aturan-aturan dalam kelembagaan BUMDes, dari kepengurusan BUMDes terdiri dari pelaksana, pembinaan atau penasehat dan pegawai. Tim pengawas BUMDes tidak berfungsi dengan baik untuk mengambil tindakan dan mengevaluasi kinerja pengelolaan para pengurus unit usaha menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, terdapat kekurangan pengalaman dalam wirausaha dan pengembangan ekonomi menjadi hambatan bagi para pengelola BUMDes. Bahkan para pengurus masih menempatkan pengelolaan BUMDes sebagai pekerjaan sampingan, sedangkan hal tersebut tidak dapat terus diabaikan dikarenakan dapat menghambat pengembangan usaha ekonomi yang di jalankan oleh BUMDes itu sendiri.

1.2 Landasan Teori

Kelembagaan atau institusional bagi administrasi publik, terkait dengan pengaturan lembaga publik dan organisasi, yang terdiri dari relasi antara peraturan, struktur serta proses dalam organisasi dan pertanggung jawaban organisasi publik (Gudono, 2014). Dari pengertian itu, maknanya ialah bahwa lembaga tidak berarti organisasi saja tetapi norma atau aturan juga yang hidup dalam masyarakat, atau bentuk sikap yang didasari pada norma dan regulasi yang eksis serta mengikat sifatnya bagi meraih kehendak bersama yang sifatnya memilih manfaat sosial. Hadirnya kelembagaan dalam masyarakat sendiri disebabkan keadaan masyarakat dilingkupi oleh banyak sikap dan regulasi atau norma dengan mengacu norma atau itu. Dengan maksud mengelola sikap individu dan kelompok maka kelembagaan dalam hal sarana atau tempat dalam mengarahkan pola yang sudah memiliki stabilitas kekuatan dan kegiatan untuk memuaskan kebutuhan wajib dilakukan melalui cara dan sistem yang eksis pada kelembagaan.

Teori kelembagaan adalah teori yang mempelajari bagaimana organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk tumbuh dan bertahan hidup di lingkungan yang bersaing dengan menjadi sah di mata para pemangku kepentingan (Jones 2004). Tentu saja, perhatian lebih perlu diberikan pada nilai-nilai organisasi normative seperti efisiensi, efektivitas, dan ekonomis sebagai fundamental dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya untuk meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Hal ini perlu diperhatikan agar sebuah institusi dapat bertahan di era globalisasi ini.

Pada dasarnya terdapat berbagai teori kelembagaan (Institusional). Misalnya teori kelembagaan yang dikemukakan oleh M. Tina Dacin & Jerry Goodstein, (2002) mengemukakan teori kelembagaan atau institusional dikenal sebagai penjelasan individu serta organisasi. Walaupun ruang lingkupnya telah dikritik sebab sangat dipakai untuk keseragaman bagi fenomena i dalam realitasnya bisa berkembang dan polanya berbeda di setiap tidak diterima apa adanya atau begitu saja, ini disebabkan i yang sifatnya partikularistik. Bagi M. Tina Dacin & Jerry Goodstein,



(2002) Tantangan di masa depan yang dihadapi teori institusional atau kelembagaan ialah bagaimana menjelajahi dan mengeksplorasi berbagai macam sudut pandang.

Di Maggio & Powell, 1983, menyatakan bahwa teori kelembagaan muncul atas kritik terhadap teori ekonomi dan kontigensi yang hanya menjelaskan struktur organisasi dengan ukuran efisien, cenderung sangat rasional dan mengabaikan faktor-faktor eksternal organisasi yang memiliki kekuatan dan bersifat non-rasional seperti Negara, norma-norma, tradisi, dan konvensi yang sebenarnya juga sangat berpengaruh dalam proses pembentukan organisasi tersebut.

Secara umum teori kelembagaan berusaha menjelaskan bahwa organisasi dalam usahanya mencapai tujuan perlu mendapatkan penerimaan yang baik dan legitimasi dari lingkungan Dimana organisasi tersebut berada. Untuk meningkatkan kemampuan kompetensi organisasi, maka landasan nilai-nilai normative organisasi seperti efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi harus menjadi perhatian serius agar organisasi mampu survive di era globalisasi saat ini.

Scot (2001) mendefinisikan institusi sebagai lembaga terdiri dari struktur dan aktivitas kognitif, normatif, dan regulatif yang memberikan stabilitas dan makna pada perilaku sosial. Institusi diangkat oleh berbagai pembawa, budaya, struktur, dan rutinitas serta operasi di berbagai tingkat yurisdiksi

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Scot (2001). Peneliti menggunakan teori ini karena dinilai relevan untuk menganalisis kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Bulu. Teori Scot (2001) akan menjelaskan kerangka kerja kelembagaan mengkategorisasikan pilar-pilar khusus kelembagaan yang mempunyai efek besar pada stabilitas dan pemaknaan kerangka kerja yang dimaksud memasukkan dimensi kelembagaan tradisional, yakni dimensi regulatif dan normatif, kultur kognitif. Adapun teori ini dibagi dalam tiga indikator yaitu:

Pertama, pilar regulatif mencakup aktivitas penetapan aturan, pemantauan, dan pengenaan sanksi. Pilar regulatif ditandai dengan hukum, aturan, regulasi, dan standar prosedur operasional yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku. Pilar regulatif terkait dengan, pemberian sanksi dan pengawasan. Lebih khusus lagi terkait dengan kemampuan dalam menegakkan norma, serta menunjukkan hukuman menegakkan melalui cara dan instrumen resmi dan informal.

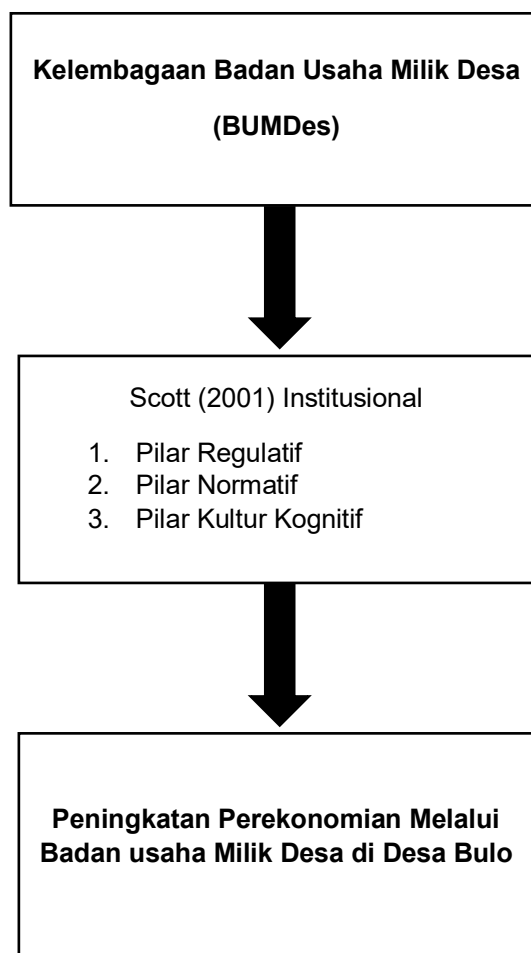
Kedua, pilar normatif. menunjuk pada aturan-aturan normatif yang meliputi, evaluasi, dan kewajiban para individu dalam aktivitas sosial. terdiri dari norma dan nilai. Norma berguna untuk memberi pedoman jalannya dan bagaimana cara mencapai sasarnya. Aspek normatif pada penilaian sertifikasi dan akreditasi, terkait bagaimana aktor melaksanakan sesuai standar normatif (nilai dan norma). Pilar ini ditandai dengan standar-standar profesi, perincian tanggung jawab moral.



Ketiga, pilar kultur kognitif menunjuk bagaimana manusia berperilaku sangat ditentukan terhadap kerja partisipan dalam suatu lingkungan tertentu. Dimensi ini penting, karena apa yang dilakukan oleh seseorang tidak lain adalah fungsi dari interpretasinya terhadap lingkungan.

Gambar 1.

Kerangka Konsep



I.3 Rumusah Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana upaya Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.4 Tujuan Penelitian

Dilandasi rumusan masalah maka, tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng rappang.

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi:

1. Manfaat Teoritis (Akademis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan data mengenai kelembagaan Badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi instansi dan organisasi masyarakat setempat untuk membantu daerah-daerah tertentu untuk lebih mandiri dalam kelembagaan Badan Usaha Milik Desa

